

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Konflik internal yang terjadi di Republik Demokratik Kongo tergolong sebagai perang besar yang memakan ribuan korban, dimana banyaknya warga sipil mengalami kekerasan secara langsung dan secara struktural. Krisis keamanan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya kelompok pemberontak dalam negeri di Republik Demokratik Kongo. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam berupa tembaga, emas, cobalt, berlian serta potensi cadangan minyak dan gas yang melimpah menjadi salah satu faktor terjadinya konflik internal di Republik Demokratik Kongo.<sup>97</sup> Lemahnya kekuasaan hukum dan pemerintah menyebabkan beberapa kelompok dapat dengan mudah untuk mengambil kekayaan alam tersebut secara ilegal. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok - kelompok pemberontak di wilayah Kongo Timur memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari tempat pengungsian yang lebih aman.

Krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap warga sipil RDK membuat mereka harus bertaruh nyawa melewati perbatasan negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara lain. Uganda sebagai negara anggota UNHCR dengan menempati posisi kedua negara benua Afrika yang menerima pengungsi internasional, Uganda turut menghadapi beberapa tantangan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, UNHCR turut terlibat dalam membantu Uganda meringankan tanggungannya. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 5, dapat disimpulkan bahwa UNHCR sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan juga hak-hak kebebasan individu milik pengungsi internasional, UNHCR telah menjalankan peranannya berdasarkan definisi dari organisasi internasional internasional oleh Clive Archer sebagai instrumen dalam pembuatan kebijakan oleh suatu negara, sebagai wadah maupun forum yang menjembatani antar aktor, dan sebagai aktor independen

---

<sup>97</sup>Yigzaw, Gedifew S, loc.cit

yang mampu membuat keputusan tanpa dipengaruhi aktor manapun. Meskipun pada pelaksanaannya, keterlibatan UNHCR atas penanganan permasalahan pengungsi Kongo di Uganda pada tahun 2021 belum begitu efektif dikarenakan lemahnya keterikatan hukum atas perilaku aktor internasional, baik negara maupun non negara yang dimiliki UNHCR. Dan berdasarkan pada definisi dari konsep *Human Security* itu sendiri, definisi segitiga kebebasan yang diantaranya adalah 1) hak asasi manusia, dimana setiap individu memiliki hak kebebasan yang tertanam sejak individu itu dilahirkan dan, 2) kemanusiaan, 3) dan pembangunan berkelanjutan telah mencakup secara menyeluruh dalam fokus perhatian yang tercantum dalam *Global Compact on Refugee* dan CRRF.

## 6.2 Saran

Dalam penelitian ini, telah dikaji secara mendalam bagaimana krisis kemanusiaan yang melanda warga sipil Republik Demokratik Kongo (RDK) memaksa mereka untuk mencari perlindungan di luar perbatasan negaranya dan bagaimana Uganda, sebagai negara penerima pengungsi terbesar kedua di Afrika, menghadapi tantangan dalam mengelola situasi ini. Peran UNHCR, sebagai lembaga internasional di bawah naungan PBB, dalam mendukung Uganda dan pengungsi Kongo, telah diuraikan dengan fokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak individu pengungsi.

Dari analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa UNHCR telah berupaya menjalankan perannya sesuai dengan definisi Clive Archer tentang organisasi internasional sebagai instrumen pembuatan kebijakan, forum jembatan antar aktor, dan aktor independen dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, efektivitas keterlibatan UNHCR dalam penanganan pengungsi Kongo di Uganda pada tahun 2021 masih menghadapi kendala signifikan. Kelemahan dalam keterikatan hukum terhadap perilaku aktor internasional, baik negara maupun non-negara, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja UNHCR.

Krisis ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme kerjasama internasional dan peningkatan keterikatan hukum untuk memperkuat efektivitas intervensi kemanusiaan. Untuk itu, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh

pemangku kepentingan, termasuk negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan lembaga kemanusiaan lainnya, guna menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penanganan krisis pengungsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika peran UNHCR dan tantangan yang dihadapinya dalam konteks pengungsi internasional. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi strategi-strategi alternatif dan model-model kerjasama yang dapat meningkatkan respons terhadap krisis kemanusiaan serupa di masa depan.

